

buletin

Parlementaria

Nomor 961/VN/2017 • Mei 2017

**Ketua DPR RI Blusukan
Ke Pasar Pandansari
Kaltim**

**UU Disabilitas
Harus Segera
Diimplementasikan**

**Jelang Lebaran
DPR RI Fokus
Pengawasan
Sembako**

**TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN**



Ketua DPR RI Setya Novanto saat paripurna pidato pembukaan masa sidang V Tahun Sidang 2016 – 2017.

Jelang Lebaran DPR RI Fokus Pengawasan Sembako

Jelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, DPR RI akan memfokuskan fungsi pengawasan pada ketersediaan sembilan bahan pokok, transportasi, bahan bakar, minyak dan gas, serta pasokan listrik.

Demikian dikatakan Ketua DPR Setya Novanto saat membacakan Pidato Pembukaan Masa Persidangan V, Tahun Sidang 2016-2017 di hadapan seluruh Anggota Dewan yang hadir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5).

“Pimpinan DPR meminta kepada Alat Kelengkapan Dewan terkait untuk memastikan hal tersebut, dengan melakukan kunjungan spesifik ke pasar tradisional serta mengecek kesiapan bandar udara, stasiun, terminal dan pelabuhan,” jelas Novanto.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan lainnya pada masa sidang ini, masih kata Novanto, DPR akan melakukan serangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap beberapa lembaga.

“Diantaranya Calon Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan 2017-2022, Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2017-2022,

dan Calon Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2017-2022,” papar Novanto.

Sementara dalam pelaksanaan fungsi anggaran, jelas politisi F-PG itu, pada masa sidang ini Pimpinan Dewan meminta kepada Komisi dan Badan Anggaran untuk fokus pada Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2018.

“Pada Rapat Paripurna tanggal 19 Mei mendatang, pemerintah akan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal sebagai pedoman penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2018,” kata Novanto.

Dalam masa sidang ini juga, Badan Pemeriksa Keuangan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 kepada DPR. “Hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan masukan untuk

pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016,” imbuh politisi asal dapil Nusa Tenggara Timur itu.

Kemudian dalam peran diplomasi parlemen, DPR akan mengagendakan serta mengirim delegasi untuk menghadiri pertemuan dan sidang atau konferensi organisasi parlemen regional maupun internasional, diantaranya Konferensi Global Legislative Openness pada 19-20 Mei 2017 di Kiev, Perancis.

Berikutnya, Asian Parliamentary Assembly Standing Committee on Staff and Financial Regulation tanggal 21-24 Mei di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kemudian 2nd Meeting of Speakers of Eurasian tanggal 26-28 Juni 2017 di Seoul, Korea Selatan, dan penyelenggaraan Sidang the 9th AIPA Caucus di Fairmont Hotel pada 17-20 Juli 2017. ■

(sf), Foto: jeyadi/hr



Indonesia Ukraina Bersepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan

Indonesia dan Ukraina bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan. Kesepakatan ini terjalin saat Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Deputy Menteri Pertahanan Ukraina Ivan Rusnak di Ukraina.

“Dari sisi parlemen, kami akan mendorong agar *Agreement on Defense Cooperation* antara Indonesia-Ukraina yang sudah ditandatangani pada 2016, dapat terealisasi. Seperti kerja sama teknis di bidang pertahanan,” kata Fadli dalam rilis yang disampaikan kepada Parlemen Kamis malam (18/5).

Dalam kesempatan tersebut, Fadli menyatakan simpati terhadap situasi yang terjadi di kawasan. Fadli berharap sengketa dapat diselesaikan melalui upaya damai dan diplomasi, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. “Tindakan militer justru akan membuat ancaman bagi *human security* dan tentunya mempersulit proses perdamaian yang ingin dicapai,” tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan perkembangan isu keamanan di Ukraina, Deputy Menteri Pertahanan Ivan Rusnak, menyampaikan tentang pendudukan di 3 wilayah yaitu Crimea, Luhansk, dan Donetsk yang dinilai mengganggu kedaulatan teritori Ukraina.

Ivan Rusnak menyambut baik hubungan kedua negara yang makin meningkat termasuk kerjasama teknis di bidang militer. Ia juga mendukung peningkatan kerja sama industri pertahanan dengan Indonesia. Menurutnya, teknologi alat-alat pertahanan yang dimiliki Ukraina dapat mendukung kebutuhan alat sista Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Fadli Zon berada di Ukraina dalam rangka menghadiri Global Open Parliament Conference. Sehari sebelum menghadiri acara tersebut, Fadli Zon berkesempatan melakukan pertemuan dengan Deputy Menteri Pertahanan Ukraina Ivan Rusnak. Fadli didampingi Anggota DPR Amelia Anggraini dan staf KBRI di Ukraina.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, pertemuan tersebut sebagai bagian dari aktivitas diplomasi DPR atas kerja sama teknis pertahanan yang sudah dilakukan Indonesia-Ukraina. Antara lain perawatan *engine* pesawat Sukhoi, pembelian kendaraan amfibi BMP 3F marinir dan 5 unit BTR-4M. Saat ini juga pihak pemerintah melalui instansi terkait sedang menjajaki pembelian pesawat Antonov An-70. ■



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Deputy Menteri Pertahanan Ukraina.

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari
ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Rizka Arinindya, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman,
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah
ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharjanto
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantera II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurrahman, Abdul Kahfi S. Kom
DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos.
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiono
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita, Ifan,
Siti Rondiyah, Oji Saputra
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

(sc), foto: dok.bksap/hr.

Paripurna DPR RI Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 pada Jumat, (19/05).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan bahwa pemerintah telah menyampaikan LKPP (unaudited) tahun 2016 kepada BPK pada tanggal 29 Maret 2017. Selanjutnya, BPK memeriksa LKPP dimaksud dalam waktu dua bulan sejak menerimanya dari pemerintah.

Pemeriksaan BPK atas LKPP ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memiliki keyakinan LKPP 2016 telah menyajikan seluruh standar akuntansi pemerintahan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Kami menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2016," ujar Moermahadi.

Menurut paparan BPK, opini WTP atas LKPP tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak tahun 2004.

Terhadap hasil ini, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan bahwa DPR melalui seluruh fraksi akan menyampaikan pandangannya terhadap laporan BPK tersebut. "Sesuai peraturan tata tertib DPR RI pasal 161, maka laporan hasil pemeriksaan BPK akan ditindaklanjuti oleh masing-masing fraksi paling lambat 3 bulan setelah LKPP disampaikan BPK kepada DPR," jelas Taufik. ■



Pimpinan DPR RI menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP tahun 2016 dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017.



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Agus Hermanto.



14 RUU Ditargetkan Rampung pada Masa Persidangan ini

Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan 14 RUU ditargetkan selesai pada masa sidang V Tahun Sidang 2016-2017 ini. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto.

Pidana Terorisme, RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, RUU tentang Kewirausahaan Nasional, RUU tentang Arsitek, RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU tentang Pertanahan, dan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Sementara, terkait dengan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diharapkan selesai pada akhir Bulan Mei 2017 ini. ■

(arn/isc) Foto: Rumi/hr

Dalam pidatonya, Novanto mengatakan saat ini terdapat 23 RUU yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah. 13 diantaranya diharapkan segera rampung dalam masa sidang V ini.

Ke-13 RUU tersebut ialah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Wawasan Nusantara, RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Selanjutnya, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak



Ketua DPR RI Setya Novanto membaca pidato pembukaan masa sidang V DPR RI tahun 2016-2017

Perkuat Nasionalisme untuk Hindari Bentrokan

Terhadap himbauan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak agar menghentikan perilaku saling menghujat dan memfitnah dalam kondisi sosial dan politik akhir-akhir ini, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto mengatakan bahwa memang sudah seharusnya Presiden menyampaikan hal tersebut, guna memperkokoh dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kita harus memperkuat rasa nasionalisme dan persahabatan antara umat beragama dan seluruhnya untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan,” ucap Agus Hermanto di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/05).

la menyatakan, apa yang disampaikan

Presiden merupakan hal yang bagus, karena Presiden adalah pimpinan tertinggi didalam pemerintahan. Seharusnya semua pihak dapat mengikuti apa yang disampaikan.

“Hal-hal kecil harus segera disikapi agar tidak menjadi besar, untuk itu kami serahkan sepenuhnya kepada aparat

keamanan sebagai penegak hukum agar dapat betul-betul mencegah supaya hal ini jangan sampai menjadi besar,” tegasnya. ■



(dep.mp) Foto: Naefturoji/hr

Ketua DPR RI Blusukan Ke Pasar Pandansari Kaltim

Ketua DPR RI Setya Novanto mengunjungi Pasar Tradisional Pandansari di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk memantau harga sembako jelang bulan suci Ramadhan.





Ketua DPR RI Setya Novanto mengunjungi Pasar Tradisional Pandansari di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Setya Novanto mengajak Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Wakil Ketua Banggar DPR Azis Syamsudin, Ketua BURT DPR Roemkono dan Wakil Ketua MPR Mahyudin, sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia tengah (WITA) menuju Pasar Pandansari, Balikpapan.

Pasar yang sempat terbakar pada 2016 ini, kondisinya masih belum sepenuhnya pulih karena di lantai 2 tempat terjadinya kebakaran belum direnovasi. Sebagian pedagang memilih berjualan di area parkir. Ada pula yang menggelar dagangan di tepi jalan Pasar Pandansari.

Sesampai di pasar, Setya Novanto langsung menandatangani sejumlah pedagang pasar. Menurut pengakuan para pedagang pasar yang berdialog langsung dengan Ketua DPR RI, sudah ada kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras dan telur. Namun, ada juga harga bahan pokok yang turun. Salah satunya bawang.

“Kenaikan harga sembako jelang bulan ramadhan merupakan fenomena berulang tiap tahun. Seharusnya ada antisipasi dari pemerintah terhadap ketersediaan maupun distribusinya,” ujar Ketua DPR RI Setya Novanto, di Pasar Pandansari, Balikpapan, Kaltim, Senin (22/05).

Salah satu penyebab kenaikan kebutuhan bahan pokok menurut politisi Partai Golkar tersebut, dikarenakan adanya permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi dan psikologi pasar jelang bulan suci Ramadhan.

Menurut dia, pemantauan juga harus dilakukan secara berkala oleh pemerintah supaya pergerakan harga bisa diantisipasi.

“Tinggal bagaimana kita nanti mencegah para spekulasi di pasaran supaya harga tidak terlalu melambung tinggi tetapi ditekan pada harga yang bisa terjangkau masyarakat,” katanya.

Kenaikan harga berbagai kebutuhan konsumsi masyarakat ini tentu sangat memberatkan masyarakat, terlebih bagi kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga agar tidak terjadi inflasi yang semakin tinggi. “Diantaranya dengan menjaga distribusi barang, pasokan, dan sistem kontrol terhadap harga,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Setya Novanto menghimbau pemerintah untuk melakukan langkah-langkah terencana, sistematis dan efisien dalam mengendalikan harga pangan yang kini mulai naik. Selain itu, kebijakan harus mampu menjangkau hingga ke kalangan bawah agar mampu menjaga stabilitas harga di pasaran sepanjang bulan Ramadhan.

“Koordinasi antar instansi pemerintah yang menangani permasalahan kenaikan harga barang kebutuhan pokok hendaknya dapat berjalan dengan sinergis dan saling mendukung. Selain itu, informasi mengenai permintaan dan penawaran barang kebutuhan pokok harus dilakukan dalam sistem tata niaga yang transparan dan berimbang,” pungkasnya.

Bersama Bupati Kutai Kartanegara Rita, Setnov demikian sapaan akrabnya memborong sejumlah barang kebutuhan pokok. Selanjutnya, bahan-bahan pokok yang sudah dibeli langsung dibagi-bagikan ke masyarakat pengunjung pasar. ■

(andrisco), foto : andri/hr

Situasi Global Masih Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018. Pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 sebesar 5,4-6,1 persen. Sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding tahun 2017, diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan menilai, angka pertumbuhan ekonomi yang diusulkan pemerintah masih cukup moderat. Menurutnya, situasi ekonomi pada tahun 2018, dinilai tak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun ini. Situasi ketidakpastian masih menjadi tren di tahun mendatang, sehingga pemerintah pun bisa melakukan adjustment angka pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN-Perubahan, seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Pemerintah sendiri menyampaikan saat ini Indonesia berada di tengah ketidakpastian ekonomi global, tentunya kita pun harus mengerti dan pahami. Ini tidak semata-mata urusan politik dalam negeri. Tetapi juga ada faktor ekonomi global, seperti kondisi ekonomi Amerika, Tiongkok, situasi Korea Selatan dan Korea Utara, termasuk masalah sentral di Eropa. Ini semua sedang wait and see, baik dari kondisi keterbukaan perbankan, kemajuan teknologi informasi, maupun dinamisasi proses keseimbangan baru,” kata Taufik, usai memimpin rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).

Taufik tak memungkir, kondisi politik tanah air pun berpengaruh cukup besar dalam situasi ekonomi. Menurutnya, transformasi kultural jangan sampai mengganggu situasi ekonomi, politik, budaya, bahkan sosial. Karena jika hal itu dibiarkan, dikhawatirkan terjadi potensi mengurangi *performance* di sektor politik dan ekonomi. Isu-isu anti toleransi, dinilai terlalu membahayakan dan merusak potensi pertumbuhan ekonomi. Situasi ekonomi dan politik seharusnya diciptakan dalam suasana kondusif.

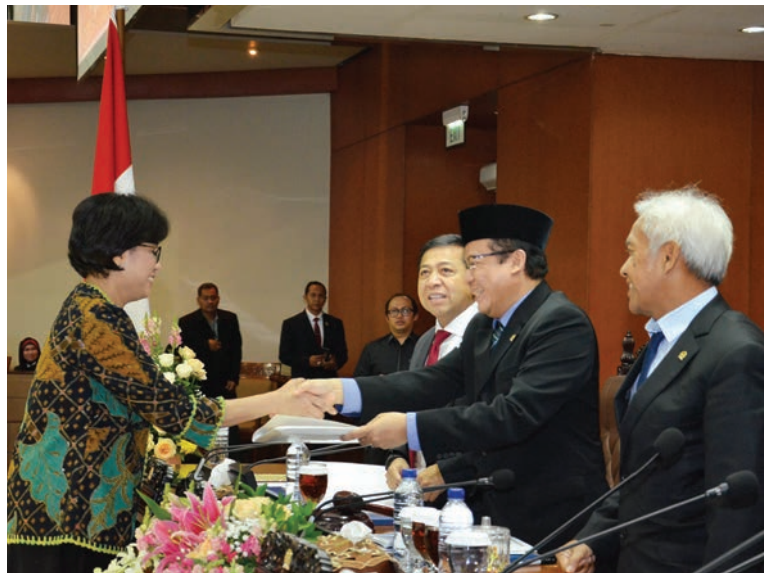
“Kita harapkan semuanya bisa berjalan sesuai dengan keinginan DPR dan pemerintah. Tidak ada program yang tidak kita setuju, manakala itu terkait dengan program yang meningkatkan

ke se ja h t e r a a n masyarakat ataupun program mengurangi disparitas atau kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Termasuk program pemerataan p e m b a n g u n a n ,” komitmen politisi Partai Amanat Nasional itu.

Dengan melihat berbagai kondisi itu, Taufik berharap DPR dan pemerintah lebih memprioritaskan pada program sektor riil yang bersifat padat karya, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mengurangi pengangguran. Ia pun berharap, konsep riil itu khususnya di infrastruktur dijadikan prioritas. Kemudian program lain seperti kesehatan dan pendidikan, maupun program lain yang langsung menyentuh masyarakat, pasti akan mendapat dukungan dan persetujuan DPR.

“Untuk di sektor lain, tinggal kita optimalkan. Kalau peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kemudian meningkatkan pendapatan pajak, itu hal-hal klasik yang sudah otomatis menjadi bagian tugas dari lembaga-lembaga pemerintah maupun Kementerian Keuangan,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah secara bertahap telah menjalankan program pembangunan nasional seperti yang digariskan dalam Nawacita. Ditengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, kinerja



Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan menerima keterangan pemerintah (Menkeu) atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018.

ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih terjaga dan tumbuh dalam tingkat yang cukup baik. Tingkat kemiskinan dan pengangguran telah berhasil diturunkan. Namun demikian, beberapa tantangan sosial ekonomi masih perlu diperhatikan.

“Tantangan yang paling utama adalah pengentasan lebih dari 27 juta saudara kita yang saat ini masih hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan modal sosial, ekonomi dan sumber daya manusianya, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara maju, adil dan sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar, kelas menengah yang meningkat jumlahnya, dan didukung sistem politik yang demokratis,” jelas Sri Mulyani. ■

(sif.ann). Foto: Arief/hr



Muhibah DPR RI ke Arab Saudi Lengkapi Revisi UU PPIILN

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah yang juga Ketua Timwas TKI memimpin kunjungan muhibah ke Arab Saudi dan Uni Emirat selama sepekan sejak Senin (15/5) hingga Minggu (21/5). Kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai input di lapangan melengkapi revisi UU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPIILN).

“Revisi UU PPIILN (Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri) sendiri sudah hampir final, pasal krusial sudah selesai. Disatu sisi kita tetap perlu input lapangan yang faktual, kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Pimpinan DPR Korkesra ini menemukan fakta dan masukan baru seputar ketenagakerjaan.

Beberapa waktu lalu saat berlangsung jumpa media bersama Dede Yusuf dan Rieke Dyah Pitaloka di Gedung Nusantara III DPR, Fahri Hamzah mengatakan RUU

yang akan menguatkan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri tinggal menunggu keseriusan dan kekompakan pemerintah.

Fahri menambahkan, ide soal perlunya integrasi data kependudukan Indonesia yang nantinya menjadi single data source pekerja yang akan berangkat ke luar negeri dengan data kependudukan negara tujuan penempatan harus disiapkan. “Upayanya perlu sistematis. Seperti Arab Saudi, mereka sudah siap dengan Labour Management System, apakah kita sudah

siap? Meski diguncang, E-KTP akan tuntas Juni 2017, “Semoga itu jadi pijakan data pengelolaan TKI,” tandas Fahri.

Selama kunjungan ke kedua negara tersebut, Delegasi Parlemen Indonesia menggelar pertemuan dengan Ketua Parlemen dan Kementerian Tenaga Kerja Uni Emirat Arab dengan agenda yang lebih luas yaitu penguatan hubungan bilateral.

Dalam rangkaian kunjungan, Delegasi DPR RI bertemu dengan KBRI Jeddah, Arab Saudi dan KBRI UEA di Abu Dhabi, mengunjungi pekerja Indonesia di shelter-shelter, dialog dengan LSM pekerja migran serta bertemu Warga Negara Indonesia di kedua negara.

Ikut serta dalam kunjungan ini Akbar Faisal (F-NASDEM), Zulfadhli (F-PG), Lalu Gede Sjamsul Mujahidin (F-Hanura) dan Achmad Fauzan Harun (F-PPP) beserta para tenaga ahli DPR. ■

(s.i.mp) Foto : Sugeng/hr.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah berdialog dengan para TKW di Arab Saudi.

Silaturahmi Pimpinan DPR RI dengan Ketua BPK Membangun Sinergi

Pimpinan DPR RI Setya Novanto dan Taufik Kurniawan menerima kunjungan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru Moermahadi Soerja. Pertemuan ini sebagai perkenalan serta membangun sinergi dan membicarakan tiga hal pokok tentang sifat, tugas dan fungsi BPK sebagai auditor negara, dan juga membicarakan agenda paripurna besok Jumat, (19/5). Paripurna pada Jumat mengagendakan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (LHK LKPP) kepada para anggota DPR.



Pimpinan DPR RI Setya Novanto dan Taufik Kurniawan menerima kunjungan Ketua BPK yang baru Moermahadi Soerja.

“Barusan kita mendapat kunjungan dari Ketua BPK bersama jajarannya, tidak lain untuk mengadakan *courtesy call*, perkenalan dengan ketua

BPK yang baru. Dalam pertemuan kita mendiskusikan, menyamakan persepsi, hal-hal yang berkaitan antara DPR dengan BPK, termasuk agenda untuk

paripurna besok,” ujar Ketua DPR Setya Novanto di hadapan para awak media, di Ruang Pimpinan Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis sore (18/5).

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Keuangan Taufik Kurniawan yang mendampingi Ketua DPR, menyampaikan pertemuan ini sebagai silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara pimpinan lembaga negara.

“Tadi perkenalan silaturahmi. Ketua BPK baru melakukan konsolidasi pada periode masa jabatan baru. Tadi hanya menyampaikan pandangan-pandangan yang sifatnya tugas dan fungsi BPK sebagai auditor negara. Besok akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah kepada paripurna. Sehingga itu yang menjadi dua hal pokok pembicaraan,” jelas Taufik.

Taufik berharap antara DPR dan BPK bisa bekerja secara sinergi untuk akuntabilitas keuangan negara. Diskusi ini juga dihadiri Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin dan Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng.

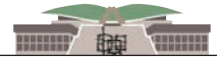
Ketua BPK Moermahadi Soerja mengatakan pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara juga sudah dilakukan tidak hanya dengan DPR. “Seperti ini juga sudah saya lakukan ke pimpinan lembaga lain. Ke MK sudah saya lakukan, kalau pemeriksaan besok kita sampaikan di paripurna,” ujar Moermahadi. ■

(foto/sc). Foto: Jeka/hr

Kerja Sama dengan China, Indonesia Harus Punya Daya Tawar Kuat



Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam.



Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai Indonesia harus punya daya tawar dan positioning yang kuat dalam kerjasama ekonomi dengan China. Hal ini diutarakan terkait Konferensi Tingkat Tinggi Belt and Road Forum (BRF) Initiative baru saja diselenggarakan di Beijing baru-baru ini.

Menurut Ecky, inisiasi China ini berkepentingan untuk mengamankan perdagangan luar negerinya. Bila China mampu mengamankan hubungan ekonomi di negara-negara peserta BRF, maka dengan kata lain China akan menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara dan Asia Tengah yang pada akhirnya mengarah ke Uni Eropa.

“Sikap Indonesia dalam menghadapi manuver-manuver dan kebijakan ekonomi perdagangan blok-blok kekuatan ekonomi, sebagaimana dulu TPP dan sekarang BRF ini, adalah harus jeli memanfaatkan peluang dan jangan mau menjadi sub-ordinat para inisiator yang tentunya memiliki kepentingan lebih besar,” ujar Ecky pada Jumat, (19/05) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Politisi PKS ini menegaskan bahwa Indonesia sebaiknya tidak hanya menjadi subordinat yang memungkinkan jalur laut dan udara menjadi wilayah kekuasaan China. “Kita jangan jadi subordinat mereka sehingga jalur laut dan udara kita dikuasai mereka. Seperti kawasan Selat Malaka yang lebih didominasi Singapura, padahal sebagian besar masuk wilayah Indonesia,” tutur legislator dapil Jawa Barat III ini.

Ecky juga menambahkan, pemerintah juga harus mempertegas sikapnya terhadap masalah Laut Cina Selatan dalam hubungannya dengan ASEAN dan juga kedaulatan Indonesia. Indonesia sepatutnya memiliki posisi dan daya tawar yang tinggi dalam alur maritim kerjasama BRF ini. “Kita harus hati-hati, jangan lah kepentingan ekonomi sesaat yg bersifat sweetener bukan fundamental malah mengorbankan kedaulatan NKRI dalam masalah Laut China Selatan,” pungkas Ecky. ■

(hs/sc), foto : jayadi/hr.

Perppu 1 Tahun 2017 Tumpang Tindih dan Rawan Penyelewengan

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dinilai tumpang tindih dan sangat rawan penyelewengan. Perppu hanya bisa dikeluarkan dalam kondisi genting yang memaksa.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya yang diterima Parlemen, Jumat (19/5). Perppu itu dikeluarkan Presiden Joko Widodo seiring keterikatan Indonesia dengan perjanjian internasional bidang perpajakan untuk saling menukar informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information). Perjanjian internasional itu ditandatangani presiden pada 8 Mei 2017.

Pasal 22 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, menyebutkan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”. Menurut Heri, bila merujuk pada UUD, tak ada kondisi mendesak atau memaksa dengan keluarnya Perppu tersebut. “Apakah perjanjian internasional bisa dikualifikasi sebagai situasi genting yang memaksa?,” tanya Heri. Menkeu perlu menjelaskan kontroversi ini.

Dengan Perppu itu, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapat akses informasi keuangan dari perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kewenangan itu melabrak prinsip kerahasiaan bank sebagaimana Pasal 40 ayat 1 UU Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan, setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank. Disinilah tumpang tindih peraturan terjadi. Perppu banyak menabrak UU.

UU lainnya yang ditabrak adalah UU No.16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 34 Ayat (1) disebutkan, petugas pajak dilarang mengungkapkan kerahasiaan para wajib pajak, baik laporan keuangan, data yang diperoleh untuk pemeriksaan, dan dokumen yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Perppu itu juga menabrak UU No.21/2008 tentang



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.

Perbankan Syariah. Dalam Pasal 41 disebutkan, bank wajib merahasiakan keterangan nasabah, simpanannya, dan investor berikut investasinya.

Tumpang tindih Perppu ini juga merambah UU No.8/1995 tentang Pasar Modal. Pasal 96 UU ini melarang memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang ingin menggunakan informasi. “Dari sini, bisa dilihat akan ada dilema yang besar bagi aparat perbankkan, pajak, dan pasar modal dalam menjalankan kebijakan pertukaran informasi tersebut. Ini akan menimbulkan ketidakpastian dan keraguan eksekusi akibat tumpang-tindihnya peraturan perundang-undangan,” ungkap Heri.

Namun begitu, Heri memahami semangat keterbukaan informasi perpajakan. Satu sisi, butuh kerja sama internasional untuk menghindari tindakan penghindaran pajak (tax avoidance), di sisi lain pemerintah juga harus hati-hati saat melakukan tukar informasi keuangan dengan negara lain. “Prinsip kehati-hatian itu, agar kita bisa terhindar dari kepentingan yang justru merugikan kepentingan nasional kita,” imbuh politisi dari dapil Jabar IV ini. ■

(mh/sc), foto: azka/hr.

BKSAP Serukan Parlemen Uni Eropa Tinjau Ulang Resolusi Sawit

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI meminta delegasi Parlemen Uni Eropa untuk meninjau ulang hasil resolusi yang diterbitkannya terkait minyak kelapa sawit. Hal tersebut diserukan oleh sejumlah anggota BKSAP saat menerima delegasi Parlemen Uni Eropa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/05).

Sebagaimana diketahui, Parlemen Uni Eropa pada 4 April 2017 mengeluarkan resolusi terkait minyak kelapa sawit dan deforestasi di Indonesia. Resolusi tersebut menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia menyebabkan deforestasi dan kebakaran hutan.

Hasil resolusi didasarkan pada hasil studi yang dilakukan Komisi Eropa tahun 2013, produksi minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang sekitar 6 juta ha dari 239 (2,5%) dari sumber kerusakan hutan global.

Menampik pandangan itu, Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menekankan, Indonesia adalah negara yang memiliki komitmen tinggi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs). Bahkan, menjadi negara terdepan dalam meratifikasi rekomendasi Paris Agreement 21 tentang perubahan iklim.

"Komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim dan SDGs sangat jelas dan sudah diakui. Dalam memformulasikan *sustainable development* pun, Indonesia menjadi salah satu champion dalam pelestarian lingkungan," tegas Nurhayati.

Untuk itu, kepada delegasi Parlemen Uni Eropa, politisi dari F-Demokrat ini meminta resolusi sawit dibatalkan dengan mempertimbangkan komitmen Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, anggota BKSAP yang juga membidangi komisi VI Erico Sotarduga menyampaikan bahwa industri kelapa sawit menampung 4 juta tenaga kerja Indonesia secara langsung, yang apabila dihentikan akan membawa *multiplier effect* terhadap 12 juta rumah tangga.

Disamping itu, masalah deforestasi akibat industri kelapa sawit tidak perlu

lebih luas. Sementara itu, setidaknya, ada 66.000 produk Eropa sangat bergantung pada minyak sawit.

Menanggapi hal itu, Delegasi Parlemen Uni Eropa Pedro Silva Pereira mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan ke Provinsi Riau dan mendapatkan informasi terkait hal ini.

Ia berharap kedua pihak (Parlemen Indonesia & Uni Eropa) akan melakukan beberapa pertemuan lagi untuk membahas hal ini. Mengingat, resolusi sawit tentu akan berpengaruh terhadap negosiasi perjanjian perdagangan antara Indonesia - Uni Eropa.

"Kami percaya Indonesia dan Uni Eropa akan mendapatkan titik temu yang positif untuk pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak, tandasnya.

Saat ini Indonesia dan Uni Eropa tengah melakukan negosiasi perjanjian perdagangan EU-Indonesia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan *Free Trade Agreement* (EU-ASEAN FTA). ■



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf.

dikhawatirkan. Mengingat, luas oil palm plantation hanya 6-7 persen dari luas Indonesia. Di sisi lain, lahan hanya bisa efektif dilakukan replanting hingga 3 kali, sehingga kedepan masyarakat akan beralih ke industri lainnya.

"Kami harap uni eropa berikan rasa keadilan bagi rakyat indonesia. Kepala sawit makin baik ke depannya dan tidak berpengaruh masif terhadap kerusakan alam," tutupnya. Sementara itu, anggota BKSAP Hamdani mengatakan, resolusi tersebut tidak berdasar karena menyarankan penggunaan minyak *rapeseed* dan minyak biji bunga matahari yang penggunaannya lebih tidak efisien serta mengancam deforestasi yang



<http://www.sawit.or.id>

(ann, mp), Foto: Arief/hr



Pengelolaan Ditjen Pajak Harus Dipisahkan dari Kemenkeu

Direktorat Jenderal Pajak memiliki beban kerja yang cukup berat. Pasalnya, Ditjen Pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara, dimana 80 persennya berasal dari pajak. Beratnya beban tugas Ditjen Pajak, membuat wacana pengelolaannya untuk dipisahkan dari Kementerian Keuangan pun berkembang.



Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia.

Demikian dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia, ketika ditemui Parlemenaria usai rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5).

Menurutnya, dengan masih bergabungnya Ditjen Pajak dengan Kemenkeu, ada beberapa peraturan yang seolah terikat dengan kementerian lainnya, bukan hanya Kemenkeu. "Kalau Ditjen Pajak masih digabung dengan Kemenkeu, ada beberapa hal yang tidak bisa dikelola sendiri, dan harus terkait dengan kebijakan atau policy dari kementerian lain, misalnya terkait kebutuhan tambahan karyawan," kata Indah.

Menurut politisi F-PDI Perjuangan itu, terkait minimnya jumlah SDM di lingkungan Ditjen Pajak, dibatasi oleh aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ia menilai, Kemenpan RB tak mengetahui secara pasti kebutuhan SDM Ditjen Pajak, padahal pihaknya dapat memahami kebutuhan SDM Ditjen Pajak yang harus dimaksimalkan.

"Kalau Ditjen Pajak mendapatkan beban dan kewajiban yang begitu besar untuk menanggung dan mengadakan anggaran untuk kebutuhan belanja negara, kemudian setiap langkahnya dibatasi oleh aturan tertentu, tentu ini menjadi tidak adil," imbuh Indah.

Hal ini menurutnya turut berdampak pada kinerja, dimana penerimaan pajak pun tak mencapai target. Sehingga jika mau adil, maka Ditjen Pajak harus menjadi badan tersendiri. Badan ini akan terpisah dengan Kemenkeu, dan akan berada di bawah komando Presiden secara langsung. Namun dalam menjalankan kerjanya, masih melakukan koordinasi dengan instansi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), seperti Kemenkeu, Bank Indonesia, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Beban dan tugas Ditjen Pajak sangat berat, namun dengan jumlah SDM sangat sedikit. Bagaimana kita menuntut seseorang lebih dari kapasitas secara manusiawi. Harusnya yang ideal-ideal itu kita berikan. Kita support SDM, IT, bukan hanya kualitas, tapi juga kuantitas. Jika itu diberikan, diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal," analisa Indah.

Selain itu, masih kata Indah, diberlakukan reward dan punishment yang sepadan. Jika berhasil mencapai target, tentu harus diberikan reward atau penghargaan yang setinggi-tingginya. Gaji dan tunjangan yang diberikan cukup besar, sehingga dapat bekerja dengan maksimal, dan menciptakan loyalitas dan integritas yang tinggi, dan kebal dari gangguan korupsi.

"Tapi kalau dia melakukan kesalahan, atau tidak mencapai target, punishment juga kita berikan. Sehingga, reward dan punishment yang diberlakukan seimbang. Itu baru kita anggap ideal," tutup politisi asal dapil Jawa Timur itu, sembari berharap dengan pemberian kewenangan yang sesuai, dapat memacu kinerja Ditjen Pajak.

Sebagaimana diketahui, target penerimaan pajak yang tak pernah tercapai lagi dalam satu dekade terakhir. Catatan Ditjen Pajak menunjukkan, terakhir kali target pajak terpenuhi adalah pada 2008, dengan pencapaian surplus Rp 36,57 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 534,53 triliun. Sejak saat itu, realisasi pajak tak pernah menembus angka 100 persen dari target yang ditetapkan.

Bahkan sejak 2015, realisasi pajak tidak ada yang berhasil mencapai 90 persen. Pada 2016, realisasi pajak hanya mencapai 81,54 persen. Pencapaian pada 2016 saja masih terbantu dengan program amnesti pajak, karena jika tidak, kemungkinan realisasi pajak hanya akan sampai pada kisaran 70 persen. ■

(sf/sc), Foto: Sofyan/hr



<http://www.hukumonline.com>

Pemerintah Dinilai Tidak Mengkaji Kenaikan Tarif Listrik

Tarif dasar listrik (TDL) yang sudah dinaikkan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) per tanggal 1 Mei 2017 dinilai tanpa kajian matang. Kenaikan TDL tersebut akan menimbulkan berbagai persoalan, terutama bagi penduduk miskin. Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi saat intruksi pada sidang Paripurna DPR RI, Kamis (18/5).



Anggota Komisi VI DPR RI, Khilmi

dengan yang punya,” ungkap Khilmi di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.

Kenaikan tarif listrik dinilai akan memberatkan masyarakat dan mengancam tumbuhnya masyarakat miskin baru. Setiap kali terjadi kenaikan TDL, maka akan dibarengi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan tentunya akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Kenaikan TDL akan menyebabkan biaya produksi meningkat.

Ketidaksetujuan Khilmi dengan kenaikan listrik sangat beralasan, saat reses banyak keluhan masyarakat di daerah pemilihannya. Di Jawa Timur X meliputi Lamongan, Gresik dan sekitarnya yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai buruh dan tani, merasa terbebani

dengan kenaikan tarif listrik.

Kebijakan menaikkan tarif listrik yang tanpa kajian mendalam dibarengi dengan kondisi perekonomian masyarakat yang masih dalam kondisi tidak menentu, terlebih lagi masyarakat akan dihadapkan dengan bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan TDL tersebut, akan menimbulkan berbagai persoalan, terutama penduduk miskin akan bertambah yang disebabkan daya beli masyarakat yang masih melemah.

Menanggapi pernyataan Khilmi, Pimpinan Sidang Paripurna Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyarankan agar persoalan ini diselesaikan terlebih dulu di komisi yang membidangi masalah tersebut. “Tentunya yang paling tepat diselesaikan di dalam komisi yang terkait. Seluruhnya bisa diklarifikasi ditanyakan waktu RDP atau rapat kerja dengan PLN yang terkait langsung,” ujar Wakil Ketua DPR. ■

(eko/sc). Foto : Jaka Nugraha/hr.

“Saya mempertanyakan tentang kenaikan listrik bagi masyarakat kecil. Banyak pertanyaan dari masyarakat tentang kenaikan listrik ini. Jadi pemerintah ini memukul rata kenaikan listrik antara masyarakat yang tidak punya

Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Spekulasi

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo meminta Bulog melakukan langkah antisipasi kenaikan harga bahan pokok yang rutin terjadi jelang puasa dan lebaran. “Jangan sampai tradisi yang memilukan ini terulang kembali pada tahun 2017 ini,” kata Rahmad Handoyo kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5)



Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo.



Kapolri Diminta Usut Tuntas Kasus Tewasnya Taruna Akpol

Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menyesalkan terjadinya peristiwa dugaan penganiayaan yang dilakukan senior Akademi Polisi (Akpol) yang menyebabkan meninggalnya taruna Akpol Brigadir Dua Taruna Muhammad Adam, Kamis (18/5) dini hari.



Anggota Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik

tradisi kekerasan yang diturunkan dari tahun ke tahun. Dengan kata lain sudah seperti lingkaran setan. Karena itu ia berharap tradisi turun temurun itu harus diputus atau dihentikan oleh pengasuh dan sistem di Akpol.

“Taruna Akpol saat proses seleksi merupakan orang-orang pilihan yang dinilai menonjol dari segi intelektual, psikis dan fisik. Mereka dibentuk di Akpol dengan tujuan menjadi calon pimpinan Polri yang cerdas, tanggap dalam melayani masyarakat dan mampu memberantas penjahat. Tradisi kekerasan yang terjadi antar taruna membuat tujuan ini tidak tercapai. Saya malah curiga tradisi kekerasan akan menyebabkan rusaknya fisik dan psikis ini akan dibawa hingga kelak keluar dari kampus,” paparnya.

Oleh karena itu, Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mendesak Kapolri untuk menghentikan tradisi kekerasan di Akpol. Disamping itu, pihaknya juga mendukung adanya audit independen dari institusi luar kepolisian untuk perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh. Termasuk kegiatan ekstra kulikuler yang pembinaannya dilakukan oleh taruna senior. ■

(ayu/sc), Foto: Arief/hr

“Saya ucapkan duka yang mendalam untuk keluarga korban, semoga keluarga diberi ketabahan dan kekuatan. Namun dibalik itu semua saya menyesalkan terjadinya peristiwa ini. Oleh karena itu saya mendukung langkah Kapolri untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas agar bisa diketahui siapa saja yang terlibat didalamnya,” ujar Erma.

Dilanjutkannya, akar masalah penyiksaan terhadap taruna ini merupakan



https://sgimage.detik.net.id



Dikatakan Rahmad, Bulog sebagai perpanjangan tangan negara merupakan instrumen utama dalam menstabilkan harga pangan. “Bulog harus dikedepankan, karena fakta di lapangan selama ini, yang mengemuka justru perburuan rente yang dilakukan para spekulan,” tegasnya.

Ia menilai, sejauh ini langkah-langkah antisipasi guna menstabilkan harga pangan jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang telah dilakukan pemerintah, sudah cukup baik. “Operasi pasar yang belakangan ini nyaris setiap hari digelar Bulog, serta sidak yang dilakukan satgas pangan sudah cukup efektif,” tandasnya.

Politisi PDI Perjuangan asal Boyolali ini mengungkapkan, keberhasilan Satgas Pangan menggerebek gudang penimbunan 183 ton bawang putih di Marunda, Jakarta Utara, (17/5), layak diapresiasi semua pihak.



http://imagespng.com

“Sudah semestinya para penimbun yang memainkan harga dan merugikan masyarakat ditindak sesuai hukum. Pemerintah tak boleh ragu dan tak boleh kalah dengan para spekulan,” kata Rahmad Handoyo.

Seperti diketahui, Satgas Pangan berhasil menggerebek gudang milik PT. TPI di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Adapun, bawang putih itu diimpor oleh dua perusahaan yaitu PT. NBM dan PT. LBU sejak April lalu.

Berdasarkan penyelidikan Bareskrim, bawang putih itu diselundupkan dari Tiongkok dan India. Masuknya barang tersebut ke Indonesia tidak memenuhi dokumen importasi yang lengkap. ■

(mp), Foto: Iwan Armanias/hr



Kebangkitan Nasional Tidak Pernah Pudar

Suasana Upacara Hari Kebangkitan Nasional pegawai Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI

Berdirinya organisasi Boedi Oetomo sekitar 109 tahun lalu merupakan salah satu tonggak penting persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dalam entitas sebuah bangsa. Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned saat memberikan amanat di Upacara Hari Kebangkitan Nasional menyampaikan, semangat kebangkitan nasional tidak pernah memudar. Upacara ini diikuti oleh jajaran pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, DPR dan DPD RI.

“Semangat kebangkitan nasional tidak pernah memudar, namun justru menunjukkan urgensinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal itu telah tercetus 109 tahun yang lalu, namun sampai sekarang tetap sangat ampuh,” ujar Djuned saat memberikan amanat di halaman Gedung Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/5).

Djuned sempat menyinggung bahwa pada 20 Mei 1908 adalah salah satu hari bersejarah bagi kebangkitan nasional. Boedi Oetomo yang berdiri pada saat itu, menjadi cikal bakal tumbuhnya nasionalisme Indonesia yang membakar seluruh jiwa rakyat untuk mencapai

kemerdekaan.

Hari itu merupakan momentum bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, serta kesadaran untuk memperbaiki diri sebagai suatu bangsa dan bergerak memperjuangkan kemerdekaannya. Kemudian, tekad sumpah pemuda itu menjadi kekuatan perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang.

Dalam upacara bendera ini, Djuned juga menyampaikan relevansi peringatan kebangkitan nasional dengan pembangunan sebagai wujud kebangkitan nasional. Aparat pemerintah berkewajiban mewujudkan pemerataan ekonomi. ■



(eko/so), Foto: Rumi/hr

<https://endraituhujek.wordpress.com>



Deding Ishak Terima Guru Madrasah Ibtidaiyah As Shalafi

Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak mengapresiasi salah satu program Humas bertajuk Kunjungan Edukasi. Dalam program inilah rakyat bisa bertemu, mengenal lebih dekat, bahkan “curhat” kepada wakilnya di DPR RI.

“Acara atau program yang merupakan kebijakan Setjen DPR, dalam hal ini Humas DPR sangat baik. Menerima semua lapisan masyarakat dari berbagai profesi untuk berkunjung ke DPR. Bertemu, mengenal lebih dekat, bahkan curhat tentang berbagai hal secara langsung dengan wakilnya. Karena itu kita (pimpinan dan anggota DPR RI) sudah sepakat untuk menjadikan DPR RI sebagai rumah rakyat Indonesia. Sehingga saya mengapresiasi program ini,” ujar Deding usai menerima guru-guru dari Madrasah Ibtidaiyah As Shalafi, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5).

Sejatinya, lanjut Politisi dari Fraksi Golkar ini, disetiap penerimaan kunjungan masyarakat juga harus melibatkan pimpinan atau anggota DPR. Agar permasalahan yang dicurhatkan atau disampaikan masyarakat tersebut dapat langsung didengar dan disampaikan

kepada pemerintah selaku eksekutor sekaligus mitra kerja DPR.

Sebut saja beberapa “curhatan” yang disampaikan para pengajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Reni M, salah satu guru dari MI As Salafiah misalnya. Ia mengeluhkan statusnya sebagai tenaga honorer yang belum juga mendapatkan tunjangan sertifikasi dan Impassing.

Saat itu disampaikan Deding bahwa tidak hanya Reni namun masih banyak guru honorer dari berbagai daerah yang mengalami hal serupa. Namun pihaknya bersama anggota Komisi VIII lainnya sangat serius menindaklanjuti keluhan tersebut. Keseriusan DPR tersebut terlihat dari dibentuknya Panja (panitia kerja) Sertifikasi dan Impassing. Panja inilah yang kemudian mendesak pemerintah dalam hal ini Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Dirjen Pendis untuk segera membayar tunjangan

sertifikasi guru dan impassing, beserta tunggaknya.

Sementara Ceppy Alamsyah dari MI Al IKhsan mengeluhkan sarana dan prasarana sekolah yang masih sangat minim. Disaat jumlah siswa terus bertambah, namun ruang kelas Madrasah ini hanya tiga kelas. Belum lagi kondisinya yang dinilai cukup memprihatinkan. Menjawab hal tersebut Deding berjanji akan menyampaikannya langsung kepada Kementerian Agama khususnya Dirjen Pendidikan Islam yang menaungi sekolah agama.

Meski demikian ia meminta agar para guru bersabar, pasalnya anggaran pemerintah untuk sekolah Islam cukup terbatas. Sementara masih banyak sekolah di Indonesia yang bernasib serupa, dan juga perlu segera mendapat penanganan. ■

(ayu). Foto: Naetunjihr.



Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak bersama Guru Madrasah Ibtidaiyah As Shalafi, Cianjur Jawa Barat

DPR RI Minta Penggunaan BBM Euro 4 Jangan Ditunda

Penerapan bahan bakar minyak (BBM) berstandar Euro 4 yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor di Indonesia harus segera direalisasikan untuk menjamin kualitas udara di masa depan. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi polusi yang semakin mengancam kesehatan masyarakat terutama di kota-kota besar. Pemerintah diminta tetap konsisten untuk memberlakukan BBM Euro 4.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha usai menjadi pembicara dalam Forum Air Quality Asia-World Bank High Level Strategy Session di markas United Nation Environment Programme (UNEP), New York, Amerika Serikat, Selasa (16/5).

“Pemerintah sudah resmi mengeluarkan aturan mengenai penerapan BBM berstandar Euro 4 melalui Peraturan Menteri LHK sejak 10 Maret 2017 lalu. Karena itu, kami meminta aturan tersebut dilaksanakan secara konsisten, bahwa semua kendaraan bermotor di Indonesia wajib menggunakan BBM standar Euro 4 mulai tahun depan,” tegas Satya dalam rilisnya kepada

Parlementaria.

Dalam implementasinya, lanjut Satya, penerapan penggunaan BBM berstandar Euro 4 tersebut tak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi tertentu, melainkan harus melibatkan lintas kementerian untuk saling bersinergi dan berkoordinasi sehingga pelaksanaan di lapangan bisa dipantau secara berkelanjutan dan berkala.

Menurutnya, ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian LHK semata, tapi juga harus bersinergi dengan kementerian lain, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian BUMN.

“Maka dari itu, kontrol pelaksanaan langsung oleh Menteri Koordinator supaya lebih kuat, karena jika dipegang satu kementerian, maka dikuatirkan akan terjadi

ego-sektoral, dan ini bisa menghambat realisasi,” papar politisi Partai Golkar itu.

Oleh sebab itu, Komisi Energi DPR akan terus mendorong kementerian terkait, khususnya Kementerian LHK dan Kementerian ESDM sebagai mitra kerja untuk segera mengimplementasikan penerapan aturan penggunaan BBM yang memiliki kadar emisi lebih bersih tersebut. Termasuk meminta kejelasan PT. Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk menyediakan BBM bertandar Euro 4.

“Kita akan tagih ke PT. Pertamina, kapan siapnya untuk menyediakan BBM yang berstandar Euro 4 itu. Karena kebutuhan akan BBM yang lebih bersih semakin tinggi di dunia, sementara di Indonesia selama ini masih berstandar Euro 2. Akibatnya kualitas udara kita



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha saat menjadi pembicara dalam Forum Air Quality Asia World Bank High Level Strategy Session di markas National Environment Programme (UNEP), New York

UU Disabilitas Harus Segera Diimplementasikan

Pemerintah didesak segera mengimplementasikan UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Setelah setahun disahkan, banyak amanat UU ini belum dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND).



masih rendah karena pencemaran udara yang cukup besar,” analisa Satya.

Ditambahkan Satya, konversi BBM baik dari BBM Euro 2 ke Euro 4 maupun konversi BBM ke BGG merupakan suatu keharusan seiring dengan kebijakan pemerintah mengembangkan energi bersih. Seperti diketahui, ada beberapa manfaat dari pemberlakuan aturan ini. Penerapan bahan bakar dengan standar Euro 4 akan memberikan keuntungan bagi konsumen. Karena peningkatan kualitas bahan bakar bisa menjamin efisiensi.

Ia menilai, kualitas udara di perkotaan juga akan semakin baik. Selama ini BBM yang digunakan di Indonesia masih berstandar Euro 2, yang memiliki gas buang dengan kandungan sulfur hingga 300 part per million (ppm). Untuk Euro 4, teknologinya menggunakan angka Research Octane Number (RON) minimal 92, yang kandungan sulfurnya hanya 50 ppm.

“Energi bersih sudah menjadi kebutuhan, kedepan Indonesia harus benar-benar terbebas dari penggunaan BBM berkadar emisi tinggi, menyusul semakin menurunnya kualitas udara di kota-kota besar akibat polusi udara yang diakibatkan dari gas buang kendaraan bermotor,” tutup politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Hadir pula dalam forum ini diantaranya Wakil Kepala Perwakilan Tetap Pemerintah Indonesia di PBB, Ina Krisnamuthi; Deputy Director of UNEP Jamil Achmad; President and Convenor Air Quality Asia Shazia Rafi; Perwakilan dari Inter Parliament Union (IPU); Chairman US-Indonesia Chamber of Commerce Wayne Forest serta para perwakilan negara Asia dari China, Korea, Pakistan. ■

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menyampaikan hal tersebut sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (19/5). Sampai saat ini, KND belum terbentuk. Padahal, ini mendesak agar akses kaum disabilitas terhadap fasilitas publik terpenuhi. “Mestinya pemerintah tidak harus didesak-desak ketika aturannya sudah ada. Nampaknya pemerintah saat ini harus didesak terus, seperti juga pembentukan BPKH,” katanya.

KND sudah saatnya diwujudkan sebagai amanat UU Disabilitas. Menurut Endang, keberadaan KND sebaiknya dibawah Kementerian Sosial, tidak berdiri independen. Ini untuk memudahkan dan mempercepat akselerasi kepentingan kaum disabilitas. “Dalam pembahasan UU Disabilitas, kita berharap bentuknya bukan seperti komisioner, tapi harus masuk dalam sistem, sehingga segala informasi dengan cepat dapat diketahui. Hambatan-hambatan juga bisa segera diatasi,” tutur Endang.



Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti

Bertahun-tahun, sambung politisi Partai Golkar ini, kaum disabilitas hampir tak punya akses. Kaum disabilitas dengan kebutuhan khusus mesti jadi tanggung jawab negara. Saatnya kaum disabilitas mendapat tempat yang laik di tengah publik. ■

(mhl/sc), Foto: Kresno/hr



(sf.mp), Foto: dok.parle/hr

<http://timorexpress.fajar.co.id>



Petugas Rutan Sialang Bungkok Abaikan Profesionalitas

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan, jumlah tahanan yang lebih dari seribu orang di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru, Riau tidak sebanding dengan jumlah petugas (sipir). Disamping itu adanya aturan dan regulasi dari petugas rutan membuat para tahanan frustrasi, sehingga mudah terprovokasi oleh tahanan lainnya untuk melakukan perlawanan



Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.

para narapidana Sialang Bungkok.

"Kejadian ini harus kita evaluasi jangan sampai kemudian justru tidak menyelesaikan masalah yang ada," ujar Nasir Djamil didampingi Kapolda Riau Irjen Zulkarnain Adinegara, Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Kakanwil Hukum dan Ham Provinsi Riau Dewa Putu Gede, serta Pelaksana Harian (PLH) Rutan kelas IIB Sialang Bungkok Pekanbaru Provinsi Riau.

Politisi PKS ini mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kapolda Riau. Ia minta

lebih kurang 124 tahanan yang masih di luar agar segera ditemukan, dan juga kepada para warga, keluarga narapidana yang kabur dihimbau untuk bisa bekerjasama. Sehingga para napi itu bisa kembali menjalani proses hukum yang dihadapi.

Lebih lanjut ia berharap Kakanwil Kumham Provinsi Riau yang baru agar bisa melakukan *recovery* dan kemudian bisa memberikan kenyamanan ketertiban di rutan. Agar para tahanan tidak ada niatan untuk lari dari rutan.

Kepada Menpan RB, Nasir berharap moratorium pegawai ditinjau kembali. Karena untuk saat ini jumlah petugas yang ada di lapangan masih minim dan tidak sebanding dengan jumlah penghuni lapas. Karena itu pula nanti akan segera dicarikan solusi dan dilihat dari aspek regulasi dan aspek SDM nya serta aspek pengawasannya agar kedepan tidak terjadi hal serupa. ■

(azka.mp), foto : azka/hr.

“Kejadian ini menunjukkan bahwa ada sisi profesionalitas yang diabaikan oleh petugas rutan, dan juga kurangnya sarana dan prasarana penunjang serta over kapasitas,” ungkap Nasir Djamil usai meninjau Rutan Sialang Bungkok, Pekanbaru, Riau, Selasa (15/5).

Menurutnya, persoalan yang paling mendasar kaburnya napi karena jumlah penghuni rutan yang melebihi kapasitas. Yang seharusnya dihuni 360 orang, dipaksakan menampung 1.870 orang, belum lagi sarana dan prasarana tidak mencukupi terutama kebutuhan dasar air bersih.

“Terkait over kapasitas memang sudah menjadi problem nasional di semua rutan dan lembaga permasyarakatan. Untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana kita mengevaluasinya,” ungkapnya.

Kedatangan Tim Kunjungan Spesifik Komisi III ke Rutan Sialang Bungkok kali ini dalam rangka melihat bagaimana penanganan dan pengamanan pasca kaburnya ratusan narapidana di Pekanbaru. Selain itu perlu segera mencari solusi terkait pasca kaburnya

Riau. Ia minta

Perlu Sistem Terpadu untuk Lumpuhkan Serangan Siber



Anggota Komisi I DPR RI, Nurdin Tampubolon.

Anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon mengatakan, melihat banyaknya pengguna internet dan potensi serangan siber, perlunya dibangun suatu sistem terpadu yang bisa melumpuhkan dan menangkal serangan-serangan itu. Terutama serangan siber terhadap objek vital Indonesia, seperti pertahanan, intelijen, korporat, hingga perbankan Tanah Air.



TNI Diminta Selidiki Gugurnya Prajurit di Natuna

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan penyelidikan, terkait gugurnya empat anggota TNI dan 8 anggota lainnya yang mengalami luka ringan dan parah dalam gladi bersih Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (17/5) siang.



Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini.

“Kami minta dilakukan penyelidikan secepatnya, apa penyebab kematiannya itu. Apakah karena *human error* atau alat-alatnya yang menyebabkan prajurit itu meninggal. Ini penting,” tegas Jazuli, sesaat sebelum Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5).

Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar Mabes TNI harus segera membuat tim pencari fakta atau penyelidikan yang objektif, serta tidak menutup-nutupi kejadian yang sebenarnya

terjadi. Karena persoalan keamanan bangsa dan negara ini tidak boleh main-main dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.

“Harus transparan, layak diketahui oleh publik, dan diketahui oleh wakil rakyat, supaya kita bisa mengantisipasi tentang kebijakan-kebijakan alutsista kita kedepannya,” tegas politisi F-PKS itu.

Politisi asal dapil Banten itu mengakui, perlu adanya evaluasi yang mendalam mengenai sistem alutsista Indonesia, mengingat banyaknya masalah yang menyertainya.

“Hal ini harus menjadi masukan buat Presiden, Bappenas, dan Kemenkeu, agar lebih memperhatikan tentang anggaran TNI dan alutsistanya, karena ini menyangkut kehormatan marwah dan wibawa bangsa dan negara RI,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR Nurdin Tambolon pun minta TNI menginvestigasi permasalahan yang sebenarnya terjadi saat latihan itu berlangsung. Permasalahan yang menyebabkan gugurnya empat TNI itu harus diusut tuntas.

“Harus betul-betul diusut tuntas, apakah ini murni kecelakaan, ataukah ada unsur sabotase, ini juga perlu kita perhatikan,” tegas politisi F-Hanura itu.

Disisi lain, Nurdin mengingatkan kepada pemerintah, agar membangun suatu sistem pertahanan, yang bagus dan berdaya saing, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi kedepannya.

“Saya mohon kepada kepala staf-staf TNI melihat hal ini menjadi suatu pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem pelatihan kita di TNI. Bukan hanya alut sista, tapi ada beberapa hal yang perlu harus diperbaiki didalam TNI,” analisa politisi asal dapil Sumut itu.

Sebagaimana diketahui, kejadian bermula ketika Senjata Giant Bow yang dioperasikan prajurit dari Batalyon Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) 1/Kostrad lepas kendali. Senjata yang seharusnya menembak drone malah mengarah ke prajurit lain. Hilang kendali Giant Bow yang berasal dari Tiongkok itu diduga karena adanya kerusakan pada pembatas elevasi pada bagian kiri. ■

Demikian dikatakannya sesaat sebelum Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5), terkait wacana pembentukan lembaga atau badan khusus yang menangani serangan siber maupun virus yang menyerang instansi pelayanan publik.

“Kita perlu membangun suatu sistem siber yang bisa menangkal serangan-serangan siber terhadap obyek vital. Ini perlu dijaga semuanya dengan suatu sistem atau badan siber yang nanti akan dibangun oleh pemerintah,” kata Nurdin.

Politisi F-Hanura itu melihat, serangan siber yang bisa melumpuhkan sistem, maupun strategi dan informasi, sehingga harus ditangani secara khusus dan komprehensif. Menurutnya, dengan membangun badan siber yang berada di bawah Kemenkopolhukam, merupakan langkah yang tepat.

“Jadi, badan siber ini nanti kalo jadi dibentuk, sudah tepat di bawah

Kemenkopolhukam sebagai koordinator, karena berfungsi untuk bisa mengorganisir daripada kementerian ataupun badan-badan di bawahnya, seperti BIN, TNI, maupun Menkominfo,” jelas Nurdin.

Politisi asal dapil Sumut itu berharap, dengan adanya lembaga atau badan siber ini, diharapkan dapat menangani serangan siber, ataupun serangan dari pihak yang tidak suka dengan Indonesia.

“Sehingga, apabila ada rencana-rencana, katakanlah yang tidak senang kepada Indonesia, bisa ditangkal melalui badan siber yang akan dikembangkan pemerintah itu,” imbu Nurdin. ■

(s/s/c) Foto: Iwan/hr

(s/s/c) Foto: runi/hr

DPRD Pesisir Selatan Ingin Adopsi Sistem DPR RI

DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, ingin mengadopsi sistem kerja yang ada di DPR RI. Mulai dari sistem jadwal rapat kerja hingga kunjungan kerja yang dilakukan para Anggota Dewan di DPR RI, coba ingin diterapkan di tingkat DPRD.

Demikian terungkap dalam pertemuan antara delegasi DPRD Pesisir Selatan dengan Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned, Kamis (18/5), di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta. Banyak perbedaan tata kerja antara dua lembaga perwakilan ini. "Ada beberapa hal, khususnya berkaitan dengan penjadwalan, hubungan mitra kerja, dan juga menyangkut kunjungan kerja," ungkap Djuned usai pertemuan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pesisir Selatan Edi Ramanto yang memimpin delegasi ini, berkonsultasi dengan Sekjen DPR RI mengenai banyak hal. Semua agenda rapat dan kunjungan kerja di DPR RI sudah digariskan dalam aturan kode etik dan UU MD3. Namun, tidak semua agenda kerja di lingkungan DPRD diatur dalam aturan mainnya.

DPRD Pesisir Selatan mendapat penjelasan bahwa ada banyak bentuk kunjungan kerja yang dilakukan Anggota

DPR RI yang sudah diatur. Misalnya, ada kunjungan kerja di masa reses, kunjungan kerja spesifik untuk mengantisipasi kejadian-kejadian khusus, hingga kunjungan ke dapilnya masing-masing. Semua bentuk kunjungan kerja ini sudah didukung anggaran dalam APBN.

Selama ini, DPRD hanya dianggarkan melakukan satu bentuk kunjungan kerja saja terkait fungsi pengawasannya. Untuk itu, DPRD Pesisir Selatan ingin mengadopsi bentuk-bentuk kunjungan kerja wakil rakyat berikut pembahasan anggarannya. "Jadi, DPRD Kabupaten Pesisir Selatan berkeinginan mengadopsi apa yang ada di DPR. DPRD Pesisir Selatan berkeinginan merubah tata tertibnya sebagai dasar hukum untuk mengajukan anggarannya," urai Djuned. ■

(mhl/sc), foto : azka/hr.



Sekjen DPR RI Achmad Djuned terima DPRD Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mujahid dalam diskusi forum legislasi.

Gay Bukan Budaya Indonesia

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mujahid menegaskan bahwa perilaku pernikahan sesama jenis bukanlah sebuah nilai yang bisa diterima dalam budaya Indonesia. Hal itu sangat bertentangan dengan landasan hukum di Indonesia. Hal itu diungkapkannya dalam diskusi forum legislasi bertajuk 'UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Mampu Jerat Pesta Gay?' bersama anggota Komnas HAM Natalius Pigai di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (23/05).

Dalam konteks UU perkawinan misalnya, sudah ditegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan dengan beda jenis kelamin, sehingga jika ada pernikahan sesama jenis kelamin jelas itu melanggar UU. "Memang jika hanya melandaskan pada hukum per hukum. UU Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan itu hanya dilakukan dengan beda jenis," jelas Sodik.

Politisi Gerindra ini menegaskan, bahwa budaya Indonesia tidak memberikan toleransi pada perilaku seks sesama jenis. Dari sudut pandang agama juga tidak membenarkan itu.

"Saya selalu mengajak jauh kebelakang. Tentang budaya Indonesia

yang berbasis pada jutaan atau ribuan etnis budaya yang tidak memberikan toleransi pada perilaku seks sejenis. Saya kira mainstreamnya tidak ada suku, bangsa, agama yang membenarkan itu," tegasnya.

Sodik juga meminta partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk mencegah masuknya budaya asing yang menyimpang. "Kepada seluruh masyarakat, khususnya orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para pemimpin lainnya untuk secara solid bersama-sama mencegah budaya ini," tutur Sodik.

Seperti diketahui, beberapa hari lalu pesta gay 'The Wild One' di Kelapa



Gading, Jakarta Utara, digerebek polisi dengan sejumlah 141 pelaku diamankan. Dari lokasi itu, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti untuk dapat diproses lebih lanjut. ■

(hs/sc). Foto: Arief/hr



Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Tiongkok Sareh Wiyono menerima kunjungan delegasi Parlemen Tiongkok Selasa (23/05) Foto : Jaka/hr

Rapat Kerja Pansus RUU penyelenggaraan Pemilu
Ketua Pansus
Lukman Eddy dengan
Menteri Dalam Negeri
Selasa (23/05), Foto : Azka/hr



Penyematan Satya Lencana Kerja Satya 20 dan 30 tahun karyawan/i Setjen DPR, MPR, dan DPD RI dalam upacara Hari Kebangkitan Nasional Senin(22/05), Foto : Jaka/hr